

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memulai pemaparan terkait latar belakang masalah ini, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian. Pada bab ini juga memaparkan beberapa penelitian yang membahas relevansi topik ini, dan juga menguraikan tinjauan pustaka yang menjadi dasar dalam mendukung penelitian ini serta menjadi acuan bagi penulis dalam menyusun hasil penelitian yaitu tentang preferensi politik dan preferensi pemilih. Selain itu, bab ini juga memaparkan kerangka pemikiran yang digambarkan melalui skema berpikir.

1.1 Latar Belakang

Pilkada merupakan salah satu mekanisme demokrasi lokal yang memiliki peran strategis dalam menentukan arah kepemimpinan dan kebijakan daerah. Melalui Pilkada, masyarakat diberikan ruang untuk menyalurkan preferensi politiknya secara langsung dalam memilih kepala daerah. Di Kota Jayapura, Pilkada terakhir dilaksanakan pada tahun 2017. Selanjutnya, pelaksanaan Pilkada berikutnya baru kembali diselenggarakan pada tahun 2024 sebagai bagian dari kebijakan Pilkada Serentak Nasional. Jika dibandingkan dengan Pilkada sebelumnya, dinamika politik di Kota Jayapura menunjukkan perubahan dalam pola kontestasi dan keterlibatan aktor politik, yang turut memengaruhi perilaku dan preferensi pemilih. Rentang waktu yang cukup panjang ini menciptakan dinamika politik yang berbeda, baik dari sisi aktor politik, konteks sosial, maupun pola perilaku.

Kota Jayapura sebagai ibu kota Provinsi Papua memiliki karakter masyarakat yang majemuk dan multietnis. Keberagaman etnik tersebut turut membentuk dinamika sosial dan politik lokal, termasuk dalam kontestasi electoral. Salah satu etnik pendatang yang telah lama menetap dan berkembang di Kota Jayapura adalah etnik Bugis. Dalam perjalanan sejarah sosialnya, etnik Bugis dikenal sebagai kelompok migran yang aktif dalam berbagai sektor kehidupan, khususnya ekonomi dan perdagangan, serta membangun jaringan sosial yang kuat melalui ikatan kekerabatan dan komunitas.

Pemilihan Kota Jayapura sebagai lokasi penelitian juga memiliki relevansi yuridis dan kebijakan, mengingat Papua merupakan daerah yang memiliki kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan melalui kebijakan Otonomi Khusus. Kebijakan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021. Otonomi Khusus memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintah daerah dan masyarakat Papua untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan serta kehidupan politik lokal sesuai dengan karakteristik sosial, budaya, dan demografis setempat.

(Kementrian Hukum dan HAM RI, 2001/2021). Dalam konteks tersebut, Pilkada tidak hanya dipahami sebagai prosedur demokrasi elektoral, tetapi juga sebagai arena penting dalam implementasi prinsip-prinsip demokrasi lokal yang berkeadilan dan kontekstual.

Perkembangan etnik Bugis di Kota Jayapura tidak hanya terbatas pada ranah sosial dan ekonomi, tetapi juga mengalami perluasan hingga ke ranah politik. Sebagai kelompok pendatang yang telah terintegrasi dengan masyarakat setempat, etnik Bugis memiliki preferensi politik yang terbentuk dari pengalaman sosial, kepentingan ekonomi, serta relasi dengan aktor politik lokal. Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat Bugis dalam aktivitas politik lokal, baik sebagai pemilih maupun sebagai aktor politik yang terlibat dalam kontestasi electoral dan lembaga perwakilan daerah. Kehadiran figure-figur yang berindikasi etnik Bugis dalam kontestasi Pilkada serta representasi di DPRD menunjukkan bahwa etnik Bugis memiliki visibilitas dan peran tertentu dalam dinamika politik lokal Kota Jayapura.



*Gambar 1.1 Pasangan Calon Walikota Jayapura 2024
Sumber: www.ceposonline.com, diakses pada 26 Mei 2025*

Dalam Pilkada Jayapura 2024, komunitas etnik Bugis memainkan peran penting sebagai basis dukungan bagi kandidat tertentu, yang secara langsung dapat memengaruhi peta politik di wilayah tersebut. Hal ini terlihat dari kehadiran dua dari empat pasangan calon Wakil Walikota yang memiliki keterkaitan dengan etnik Bugis, baik melalui latar belakang etnik, jaringan sosial, maupun kedekatan dengan komunitas Bugis di Jayapura. Calon tersebut yaitu paslon nomor 4 Abisai Rollo-Rustan Saru dan paslon nomor 1 Frans Pekey-Mansur M. Dibandingkan dengan Pilkada terakhir di tahun 2017, saat itu hanya terdapat satu pasang calon tunggal, yaitu Benhur Tomi Mano-Rustan Saru, sehingga keterwakilan orang Bugis menjadi cukup

dominan di Pilkada.

Keterlibatan calon dari etnik Bugis dalam Pilkada Wali Kota Jayapura Tahun 2024 kemudian dibandingkan dengan keterwakilan calon legislatif dari etnik Bugis pada Pemilu Legislatif 2024. Perbandingan ini digunakan sebagai bahan analisis untuk melihat kecenderungan preferensi politik etnik Bugis. Perlu dijelaskan bahwa data mengenai etnik kandidat tidak bersifat resmi dan sepenuhnya merupakan hasil analisis penulis berdasarkan informasi publik yang tersedia. Data kenaggotaan DPRD disajikan sebagai konteks representasi politik etnik Bugis dan tidak digunakan sebagai dasar analisis perilaku memilih.

Tabel 1.1 Representasi Anggota DPRD Kota Jayapura Berdasarkan Indikasi Etnik (Periode 2024-2029)

No	Nama Anggota DPRD	Partai	Dapil	Indikasi Etnik
1.	Mustang	PDI-P	I	Bugis (indikatif)
2.	Theos Revelino Benigno Ajomi	Golkar	I	Non-Bugis
3.	H. Syahril	PAN	I	Bugis (indikatif)
4.	Asriyani	NasDem	I	Bugis (indikatif)
5.	Max Karubaba	Gerindra	I	Non-Bugis
6.	Agustinus Rande	Gerindra	I	Non-Bugis
7.	Armaya Latuperissa Siregar	PSI	I	Non-Bugis
8.	Ridol Veep Hassor	PKN	I	Non-Bugis
9.	H. Mursidin	PPP	I	Bugis (indikatif)
10.	Yuli Rahman	Golkar	II	Bugis (indikatif)
11.	Andrys Rovaël Horman	PDI-P	II	Non-Bugis
12.	Peter Parasi Tambunan	Gerindra	II	Non-Bugis
13.	Deli Lusiana Watak	Gelora	II	Non-Bugis
14.	Fajar Rizki Wanggai	NasDem	II	Non-Bugis
15.	Imam Khoiri	PKS	II	Non-Bugis
16.	Rudy Yowan Wenda	Demokrat	II	Non-Bugis
17.	Sarce Sorreng	Hanura	II	Non-Bugis
18.	Burman Minson Waromi	Golkar	III	Non-Bugis
19.	Andi Sudirman	PKB	III	Bugis (indikatif)
20.	Ismail Bepa Ladopurap	PSI	III	Non-Bugis
21.	Yusuf Serang Tame	Golkar	III	Non-Bugis
22.	Pares Lood Wenda	NasDem	III	Non-Bugis
23.	Selki Tabuni	Perindo	III	Non-Bugis
24.	Ngadino	PKS	III	Bugis (indikatif)
25.	Abisai Rollo	Golkar	IV	Non-Bugis
26.	Hj. Marni Jaya	PDI-P	IV	Bugis (indikatif)
27.	Novelt Azriel Krey	NasDem	IV	Non-Bugis
28.	Maria Pampang	Demokrat	IV	Non-Bugis
29.	Muhammad Yusran Yunus	PKS	IV	Bugis (indikatif)
30.	Maksan	Gelora	IV	Bugis (indikatif)
31.	Eko Nurjaya	Gerindra	IV	Bugis (indikatif)
32.	Jaharuddin	PPP	IV	Bugis (indikatif)
33.	Irmanto Rannu	Hanura	IV	Non-Bugis
34.	Akhmad Sujana	Golkar	IV	Bugis (indikatif)
35.	Barend Bartolomeus Taniau	PKB	IV	Non-Bugis

Sumber: KPU Kota Jayapura, diolah penulis.

Tabel di atas menunjukkan komposisi anggota DPRD Kota Jayapura 2024-2029 berdasarkan indikasi latar belakang etnik. Dari total 35 anggota DPRD, terdapat 13 anggota yang berindikasi berasal dari etnik Bugis. Data ini

disajikan sebagai konteks representasi politik etnik Bugis di tingkat legislative daerah dan digunakan untuk memperkuat pemahaman mengenai visibilitas politik etnik Bugis dalam dinamika politik lokal, tanpa dimaksudkan sebagai analisis perilaku memilih dalam pemilu legislatif.

Fenomena keterlibatan etnik Bugis menjadi menarik untuk dikaji lebih lanjut, khususnya dari sisi perilaku pemilih. Preferensi politik pemilih etnik Bugis tidak dapat dipahami secara sederhana atau tunggal, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor-faktor tersebut meliputi faktor sosiologis, seperti ikatan etnik, lingkungan sosial, dan jaringan komunitas; faktor psikologis, seperti kedekatan emosional, persepsi terhadap figure kandidat, rasa keterwakilan, dan identifikasi sosial; serta faktor rasional, seperti pertimbangan terhadap visi dan misi, program kerja, serta rekam jejak kandidat.

Meskipun demikian, kajian mengenai preferensi politik pemilih etnik Bugis dihadapkan pada keterbatasan data kuantitatif, khususnya terkait jumlah penduduk dan tingkat partisipasi pemilih berdasarkan etnik. Lembaga negara seperti BPS dan KPU tidak hanya menyediakan data resmi yang mengklasifikasikan penduduk maupun pemilih berdasarkan latar belakang etnik. Oleh karena itu, penelitian ini tidak bertujuan untuk mengukur partisipasi pemilih secara statistic, melainkan berfokus pada pemahaman mendalam mengenai preferensi politik pemilih etnik Bugis melalui pendekatan kualitatif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana preferensi politik pemilih etnik Bugis dalam Pilkada di Kota Jayapura Tahun 2024 terbentuk. Melalui pemahaman yang lebih mendalam mengenai preferensi politik pemilih etnik Bugis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya kajian mengenai keberagaman etnik dan dinamika politik lokal di Indonesia, khususnya dalam konteks Pilkada di Kota Jayapura. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Preferensi Politik Pemilih Etnik Bugis pada Pilkada di Jayapura Tahun 2024”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, rumusan masalah difokuskan pada bagaimana preferensi politik yang mempengaruhi pemilih etnik Bugis dalam memilih calon kepala daerah pada Pilkada Jayapura 2024.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi politik pemilih etnik Bugis dalam Pilkada Jayapura 2024, dengan menelaah faktor-faktor yang membentuk pilihan politik mereka. Secara khusus, penelitian ini berupaya memahami bagaimana identitas etnik, pengalaman sosial, persepsi terhadap kandidat, serta pertimbangan rasional memengaruhi sikap dan keputusan memilih masyarakat Bugis dalam konteks dinamika politik lokal Kota Jayapura.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat teoritis dan praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini dapat memperkaya literatur ilmu politik, khususnya dalam memahami pengaruh faktor sosial, ekonomi, dan kultural terhadap preferensi politik, serta mengembangkan teori preferensi politik yang melibatkan identitas etnik politik, serta mengembangkan teori preferensi politik yang melibatkan identitas etnik dalam konteks Pilkada di wilayah multietnis. Secara praktis, hasil penelitian ini bermanfaat bagi calon kepala daerah dan partai politik dalam merancang strategi kampanye yang lebih efektif dengan menyesuaikan pesan dan program kerja yang sesuai dengan kebutuhan komunitas Bugis di Jayapura. Selain itu, bagi pemerintah daerah, penelitian ini dapat menjadi acuan dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif dan memperhatikan keberagaman etnik di wilayah tersebut. Penelitian ini juga memberikan kontribusi bagi peneliti dan pengamat politik sebagai referensi untuk studi lebih lanjut tentang hubungan antara etnisitas dan politik, serta memberikan wawasan kepada masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam proses politik dan pengaruh budaya terhadap pilihan politik mereka.

1.5 Penelitian Terdahulu

Pada penelitian ini penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Selain itu, penelitian terdahulu bermaksud untuk melihat kesamaan tema, sehingga dimungkinkan terhadap beberapa kesamaan teori atau landasan yang dapat digunakan sebagai rujukan dalam menganalisis permasalahan penelitian ini.

1. Perilaku Memilih Masyarakat Etnik Bugis dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu

Penelitian yang dilakukan oleh Ananda (2024) dengan judul "*Perilaku Memilih Masyarakat Etnik Bugis dalam Pemilihan Bupati di Kabupaten Tanah Bumbu*" bertujuan untuk menganalisis perilaku memilih masyarakat etnik Bugis dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menitikberatkan pada faktor-faktor yang memengaruhi preferensi politik pemilih, khususnya faktor sosial dan kultural. Dalam penelitian tersebut dijelaskan bahwa ikatan kekerabatan, kesamaan latar belakang etnik, serta peran tokoh masyarakat memiliki pengaruh dalam membentuk pilihan politik masyarakat Bugis.

Hasil penelitian Ananda (2024) menunjukkan bahwa identitas etnik masih menjadi salah satu pertimbangan dalam perilaku memilih masyarakat Bugis, meskipun tidak berdiri sendiri dan berinteraksi dengan faktor lain dalam proses pengambilan keputusan politik. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena sama-sama mengkaji preferensi politik pemilih etnik Bugis dalam konteks Pilkada. Oleh karena itu, penelitian terdahulu ini dapat

dijadikan sebagai rujukan untuk memahami pola perilaku memilih masyarakat etnik Bugis di wilayah yang berbeda, khususnya dalam konteks Pilkada di Kota Jayapura.

2. Analisis Komunikasi Antarbudaya dalam Proses Adaptasi Masyarakat Etnik Bugis dan Etnik Papua di Kota Jayapura

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini salah satunya dilakukan oleh Ismiunia Hasmar, Jeanny Maria Fatimah, dan Muhammad Farid (2023) dengan judul "*Analisis Komunikasi Antarbudaya dalam Proses Adaptasi Masyarakat Etnik Bugis dan Etnik Papua di Kota Jayapura*". Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif metode fenomenologi untuk menggambarkan pengalaman komunikasi antarbudaya antara etnik Bugis sebagai pendatang dan etnik Papua sebagai masyarakat lokal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses adaptasi kedua etnik berlangsung melalui berbagai bentuk komunikasi, seperti penyesuaian bahasa, dialek, kebiasaan sosial, serta keterlibatan dalam praktik budaya setempat. Penelitian ini juga menemukan bahwa kesamaan mata pencaharian, khususnya sebagai nelayan, serta keterlibatan dalam kegiatan sosial dan budaya, menjadi faktor pendukung terciptanya hubungan yang relative harmonis meskipun berada dalam konteks sosial yang rawan konflik.

Selain itu, penelitian tersebut menegaskan bahwa adaptasi antarbudaya tidak hanya dilakukan oleh masyarakat pendatang, tetapi juga berlangsung secara timbal balik antara etnik Bugis dan etnik Papua. Proses adaptasi dipengaruhi oleh kemampuan komunikasi individu, lingkungan sosial, serta pengalaman hidup bersama dalam jangka waktu yang lama. Namun, penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi dan budaya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga belum secara spesifik mengkaji preferensi politik atau pilihan politik masyarakat etnik Bugis dalam konteks pemilihan kepala daerah. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi rujukan penting bagi penelitian penulis, sekaligus memberikan ruang untuk melengkapi kajian sebelumnya dengan fokus pada preferensi politik pemilih etnik Bugis di Kota Jayapura, khususnya dalam konteks Pilkada.

3. Tipe Partisipasi Politik Masyarakat Suku Bugis dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Dzaky, Adam Idris, dan Muhammad Hairul Saleh (2023) dengan judul "*Tipe Partisipasi Politik Masyarakat Suku Bugis dalam Pemilihan Walikota Samarinda Tahun 2020*" bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan bentuk serta tipe partisipasi politik masyarakat suku Bugis dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara langsung di lapangan. Fokus penelitian diarahkan pada tipe-tipe partisipasi politik Menurut Milbrath dan Geol, yaitu apatis, spectator, gladiator, dan pengeritik, dalam konteks

keterlibatan masyarakat Bugis pada Pilkada Kota Samarinda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi politik masyarakat suku Bugis di Kota Samarinda memiliki variasi tipe, mulai dari partisipasi pasif hingga partisipasi aktif dalam proses politik. Penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan penulis karena terdapat kesamaan yaitu mengkaji masyarakat etnik Bugis dalam konteks pemilihan kepala daerah. Meskipun lokasi dan tahun penelitian berbeda, temuan dalam penelitian ini memberikan gambaran penting mengenai pola partisipasi dan keterlibatan politik masyarakat Bugis, yang dapat menjadi rujukan dalam memahami preferensi politik pemilih etnik Bugis pada Pilkada di Kota Jayapura Tahun 2024.

1.6 Preferensi Politik

Tindakan politik merupakan hasil dari preferensi politik yang mencerminkan nilai-nilai politik yang diyakini oleh individu (Muna, 2024). Preferensi politik merujuk pada sikap, pandangan dan orientasi seseorang terhadap isu-isu politik, ideologi, partai politik, dan tokoh-tokoh politik. Oleh karena itu, preferensi politik berperan sebagai faktor yang dapat membentuk serta memengaruhi kondisi politik yang dihadapi oleh seseorang. Preferensi politik memiliki hubungan yang erat dengan perilaku politik, dimana preferensi politik mencerminkan sikap dan keyakinan dasar seseorang terhadap dunia politik. Sebagai suatu fenomena yang bersifat internal, subjektif dan cenderung laten, mencerminkan landasan berpikir individu. Sementara itu, perilaku politik adalah tindakan nyata yang dilakukan individu atau kelompok dalam ranah politik, yang dapat diamati dan diukur. Meskipun preferensi politik sering menjadi pendorong bagi perilaku politik, hubungan keduanya tidak terlalu linier dan dipengaruhi oleh berbagai faktor situasional, norma sosial serta insentif atau hambatan yang ada. Dengan kata lain, preferensi politik menjelaskan kecenderungan politik seseorang, sedangkan perilaku politik menggambarkan tindakan mereka sebagai respons terhadap preferensi tersebut.

Preferensi politik terbentuk melalui internalisasi nilai-nilai sosial dan politik yang diyakini oleh individu serta interaksinya dengan berbagai faktor eksternal seperti lingkungan sosial, media dan pengalaman politik. Menurut (Syafhendry, 2016), perilaku memilih yang mencerminkan preferensi politik tidak muncul secara spontan, melainkan melalui proses pertimbangan yang melibatkan unsur rasional dan irasional. Pemilih dapat membuat keputusan berdasarkan analisis terhadap visi, misi dan program kerja kandidat atau sebaliknya, memilih berdasarkan kedekatan emosional, kesamaan identitas dan pengaruh lingkungan sekitar.

1.7 Preferensi Pemilih

Preferensi pemilih merupakan suatu konsep yang digunakan untuk

menjelaskan kecenderungan individu dalam menentukan pilihan politiknya, khususnya dalam konteks pemilihan umum. Preferensi ini mencerminkan cara pandang dan sikap politik seseorang terhadap calon atau partai politik tertentu, yang diwujudkan dalam bentuk tindakan politik seperti memberikan suara dalam pemilu. Dengan kata lain, preferensi pemilih tidak sekedar merujuk pada keputusan akhir dalam memilih, melainkan merupakan hasil dari proses kognitif, afektif dan sosial yang kompleks (Meilinda, 2021).

Preferensi pemilih merupakan bentuk sikap politik individu yang diwujudkan melalui pilihan terhadap calon atau partai politik dalam suatu pemilu. Preferensi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan dibentuk dan dipengaruhi oleh sejumlah faktor yang saling berinteraksi dalam kehidupan sosial dan politik pemilih. Dalam pandangan Dr. H. Syafhendry (2016), terdapat berbagai faktor utama yang secara signifikan memengaruhi pembentukan preferensi politik seseorang. Faktor-faktor tersebut antara lain meliputi faktor sosial, psikologis, ekonomi serta pengaruh media dan pengalaman politik individu. Preferensi pemilih pada umumnya dibagi ke dalam tiga pendekatan.

1.7.1 Pendekatan Sosiologis

Pendekatan Sosiologis atau yang sering disebut Mazhab Columbia adalah salah satu pendekatan klasik dalam studi perilaku pemilih yang berkembang di Amerika Serikat pada awal tahun 1940-an. Pendekatan ini dikembangkan oleh tim peneliti dari Universitas Columbia, terutama Paul Lazarsfeld dan koleganya melalui studi lapangan terkenal mereka dalam *The People's Choice* (1944). Fokus utama pendekatan ini adalah pengaruh faktor sosial terhadap keputusan politik individu, bukan semata-mata rasionalitas atau emosi pribadi.

Pokok-pokok Pendekatan Sosiologis/Mazhab Columbia

1. Pemilih sebagai produk dari lingkungan sosialnya

Pendekatan ini melihat bahwa perilaku memilih dipengaruhi secara kuat oleh latar belakang sosial seseorang, seperti:

- a. Kelas sosial (ekonomi)
- b. Agama
- c. Etnisitas/keetnikn
- d. Wilayah tempat tinggal
- e. Ikatan keluarga, komunitas, dan kelompok sosial lain

2. Voting behavior sebagai ekspresi identitas sosial

Dalam pendekatan ini, orang memilih bukan semata karena program atau janji politik, tetapi karena keterikatan sosial mereka. Misalnya, seseorang dari komunitas etnik tertentu cenderung memilih calon dari etnik yang sama, bukan karena dia telah menilai rasionalitas programnya, tetapi karena adanya solidaritas sosial atau loyalitas kelompok.

3. Pengaruh opini kelompok lebih besar daripada media

Dalam penelitian Lazarsfeld, ditemukan bahwa pengaruh opini teman, keluarga, dan lingkungan sosial lebih dominan dalam membentuk pilihan politik dibandingkan pengaruh langsung dari media massa. Ini memunculkan konsep “*two step flow of communication*”, dimana pemilih sering dipengaruhi oleh tokoh-tokoh informal di lingkungannya.

Ciri-ciri Perilaku Pemilih dalam Pendekatan Sosiologis

1. Pemilih tidak otonom sepenuhnya; pilihan politiknya sangat dipengaruhi oleh struktur sosial tempat ia berada.
2. Tidak banyak berubah dalam jangka pendek, karena struktur sosial cenderung bersifat stabil.
3. Loyalitas kepada kelompok sosial tertentu lebih penting daripada isi kampanye atau citra kandidat.

Kritik terhadap Pendekatan Columbia

1. Terlalu deterministic: seolah-olah individu tidak memiliki otonomi pribadi dalam memilih.
2. Kuran menjelaskan perubahan perilaku pemilih dalam jangka pendek (misalnya *swing voters*).
3. Mengabaikan faktor psikologis (emosi, persepsi kandidat) dan rasionalitas pemilih (evaluasi program, isu, dan kepentingan pribadi).

Dalam Pilkada Jayapura 2024, pendekatan sosiologis dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku masyarakat Bugis yang cenderung memilih calon wakil walikota dari etnik Bugis seperti Rustan Saru atau Mansur M. bukan semata-mata karena kapabilitas, tetapi karena adanya identifikasi etnik dan harapan keterwakilan dalam pemerintahan. Mereka merasa jika “orang kita” menang, maka aspirasi komunitas akan lebih diperhatikan. Dalam masyarakat multietnis seperti Jayapura, identitas keetnikan dan jaringan sosial berbasis etnik menjadi faktor kuat yang membentuk pilihan politik.

Pendekatan sosiologis atau Mazhab Columbia menunjukkan bahwa struktur sosial membentuk perilaku politik individu. Pemilih bukanlah agen bebas yang rasional sepenuhnya, melainkan seseorang yang terikat dalam jaringan sosial, identitas, dan budaya komunitasnya. Dalam konteks pemilu lokal seperti di Jayapura, pendekatan ini sangat relevan terutama dalam menjelaskan solidaritas etnik, keetnikan, dan loyalitas sosial yang kuat dalam menentukan pilihan politik.

1.7.2 Pendekatan Psikologis

Pendekatan psikologis atau yang dikenal sebagai Mazhab Michigan merupakan salah satu pendekatan penting dalam studi perilaku pemilih yang berkembang di Amerika Serikat pada dekade 1950-an. Pendekatan ini dikembangkan oleh para peneliti dari Universitas Michigan, di antaranya Angus Campbell, Philip Converse, Warren Miller, dan Donald Stokes melalui proyek

penelitian berjudul *The American Voter*. Pendekatan ini menitikberatkan pada faktor-faktor psikologis individu dalam menentukan pilihan politik, khususnya dalam pemilihan umum. Fokus utama pendekatan ini adalah bagaimana sikap, persepsi, dan identifikasi psikologis terhadap partai politik, kandidat, dan isu-isu politik mempengaruhi perilaku pemilih.

Dalam pendekatan psikologis, perilaku memilih tidak hanya dilihat sebagai hasil dari kondisi sosial seperti kelas, agama, atau etnik, tetapi lebih pada hasil dari orientasi psikologis yang dibentuk oleh pengalaman dan sosialisasi politik jangka panjang. Pemilih dipandang sebagai individu yang memiliki keterikatan emosional atau kedekatan psikologis terhadap partai politik tertentu, yang disebut dengan identitas partai. Identifikasi ini dianggap sebagai penentu utama dalam membentuk preferensi politik dan cenderung bersifat stabil dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, dalam pendekatan ini, pemilih cenderung loyal terhadap partai pilihannya, dan keputusan memilih lebih dipengaruhi oleh perasaan atau kepercayaan terhadap partai dan kandidat, bukan semata-mata oleh pertimbangan rasional atau kondisi sosial.

Pendekatan psikologis mengidentifikasi tiga jenis orientasi utama yang memengaruhi perilaku pemilih, yaitu orientasi terhadap partai politik, orientasi terhadap kandidat, dan orientasi terhadap isu. Orientasi terhadap partai politik mencerminkan tingkat kedekatan atau loyalitas emosional pemilih terhadap partai tertentu. Orientasi terhadap kandidat berkaitan dengan persepsi pemilih terhadap kepribadian, kemampuan, dan rekam jejak tokoh yang mencalonkan diri, serta apakah kandidat dianggap layak dan dapat dipercaya. Sementara itu, orientasi terhadap isu merujuk pada sejauh mana pandangan dan posisi politik pemilih sejalan dengan sikap kandidat atau partai terhadap isu-isu publik tertentu. Ketiga orientasi ini saling berinteraksi dan memengaruhi keputusan akhir pemilih dalam menentukan pilihan politik mereka.

1.7.3 Pendekatan Pilihan Rasional (*Rational Choice*)

Pilihan rasional adalah sebuah pendekatan teori dalam studi perilaku pemilih yang berasumsi bahwa individu bertindak secara rasional dalam menentukan pilihannya. Pemilih dianggap melakukan kalkulasi untung-rugi (*cost-benefit analysis*) sebelum memutuskan untuk memilih calon atau partai tertentu. Mereka tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti agama, jenis kelamin atau latar belakang sosial, melainkan berdasarkan pertimbangan rasional yang mengutamakan manfaat yang akan diperoleh dari pilihan tersebut. Oleh karena itu, perilaku memilih tidak semata-mata dipengaruhi oleh faktor sosial atau emosional, tetapi juga oleh penilaian rasional terhadap manfaat yang diharapkan dari suatu pilihan politik.

Menurut Anrhone Downs (1957), pelopor teori ini, pemilih akan memilih kandidat atau partai yang dianggap memberikan keuntungan terbesar bagi dirinya, baik dalam bentuk program, kebijakan, maupun prestasi kandidat. Jika

pemilih merasa tidak ada pilihan yang menguntungkan, mereka bahkan dapat memutuskan untuk tidak memilih sama sekali. Pendekatan ini menekankan bahwa pemilih adalah aktor yang rasional dan kritis, yang mampu mengumpulkan, meneliti dan membandingkan informasi yang tersedia sebelum menentukan pilihan politiknya (Roth, 2009). Bahkan, apabila memilih menilai bahwa tidak terdapat pilihan yang memberikan keuntungan signifikan, mereka dapat memutuskan untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau bersikap apatis. Kondisi ini menunjukkan bahwa baik keputusan untuk memilih maupun tidak memilih sama-sama merupakan hasil dari pertimbangan rasional yang didasarkan pada evaluasi untung dan rugi.

Menurut Coleman (1990), tindakan individu selalu didasarkan pada tujuan tertentu yang ingin dicapai. Individu akan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya dan mempertimbangkan alternatif tindakan yang ada, kemudian memilih opsi yang memberikan manfaat terbesar. Dalam konteks perilaku memilih, pemilih akan menilai berbagai kandidat atau partai berdasarkan program, rekam jejak, serta potensi manfaat yang akan diterima, baik secara pribadi maupun kelompok. Pilihan politik yang diambil merupakan hasil dari proses rasionalisasi dan kalkulasi terhadap berbagai informasi yang tersedia (Pujileksono & Siregar, 2022).

Pendekatan pilihan rasional memandang bahwa perilaku politik pada tingkat kolektif merupakan akumulasi dari keputusan rasional individu pada tingkat mikro. Artinya, hasil pemilih umum tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan rasional yang dilakukan oleh masing-masing pemilih. Ketika pemilih semakin rasional dalam menentukan pilihan, kandidat dan partai politik akan terdorong untuk menawarkan program yang lebih realistis, solutif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks ini, pendekatan pilihan rasional membantu menjelaskan mengapa pemilih dapat bersikap pragmatis dan fleksibel, serta tidak selalu terikat pada loyalkitas jangka panjang terhadap kandidat atau partai tertentu (Mujani, Liddle, & Ambardi, 2012).

Pendekatan pilihan rasional menekankan bahwa perilaku politik kolektif dalam masyarakat, seperti hasil pemilihan umum, merupakan akumulasi dari keputusan rasional individu. Semakin tinggi tingkat rasionalitas pemilih, semakin besar peluang terciptanya proses demokrasi yang sehat dan berkualitas, karena kandidat terdorong untuk menawarkan program dan kebijakan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Dalam konteks Indonesia, pendekatan ini relevan untuk menjelaskan kecenderungan pemilih yang tidak hanya dipengaruhi oleh identitas sosial, tetapi juga oleh pertimbangan rasional terhadap kinerja, program, dan kemampuan kandidat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan pilihan rasional menjadi kerangka teoritis yang penting untuk memahami perilaku memilih dalam demokrasi lokal, di mana kebijakan publik dan kepemimpinan kepala daerah memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

1.8 Konsep Etnik

Konsep etnik telah banyak dibahas oleh para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Menurut Barth (1969), etnik dipahami sebagai kelompok yang memiliki batas-batas sosial dan budaya yang membedakannya dengan kelompok lain, di mana identitas etnik terus dipelihara melalui interaksi sosial. Sementara itu, menurut Koentjaraningrat (2009), etnik adalah sekelompok manusia yang memiliki kesatuan budaya serta terikat oleh identitas bahasa, adat, dan perasaan kebersamaan. Definisi ini menekankan pentingnya unsur budaya dan kesadaran kolektif dalam membentuk etnik.

Menurut Fredrik Barth, identitas etnik bukanlah sesuatu yang statis, melainkan hasil dari interaksi dan negosiasi sosial. Dalam pandangan ini, etnik lebih dilihat sebagai kategori sosial yang dibangun melalui relasi dengan kelompok lain, bukan semata-mata karena kesamaan fisik atau geografis. Clifford Geertz (1973) juga menyatakan bahwa etnik memiliki dasar pada simbol-simbol budaya seperti bahasa, agama, adat, dan mitos yang menjadi sumber makna bagi para anggotanya.

Max Weber (1978) memandang etnik sebagai kelompok manusia yang memiliki keyakinan subjektif akan kesamaan asal-usul, terlepas dari kebenaran historisnya. Hal ini berarti bahwa rasa kebersamaan dan persepsi kolektif sering kali lebih berperan dalam membentuk etnik dibandingkan faktor biologis. Etnik bukan hanya hasil warisan sejarah, melainkan juga konstruksi sosial yang diperkuat oleh simbol dan praktik budaya.

Selain itu, Anthony D. Smith (1986) menegaskan bahwa etnik merupakan komunitas yang ditandai oleh kesamaan nama, mitos asal-usul, sejarah kolektif, dan budaya khas. Identitas etnik bersifat jangka panjang, tetapi dapat berubah mengikuti dinamika politik, ekonomi, dan sosial. Pandangan Smith memperlihatkan bahwa etnik memiliki dimensi historis yang kuat, di mana memori kolektif menjadi unsur penting dalam mempertahankan eksistensinya.

Sumber pembentuk etnik dapat ditelusuri dari berbagai faktor.

1. Pertama, bahasa menjadi salah satu penanda identitas etnik yang paling jelas. Bahasa bukan hanya alat komunikasi, tetapi juga simbol kebersamaan dan identitas kelompok.
2. Kedua, agama dan kepercayaan berperan besar dalam membedakan satu etnik dengan etnik lain, karena sistem kepercayaan membentuk nilai-nilai dan norma sosial yang khas.
3. Ketiga, adat istiadat dan tradisi menjadi sumber utama pembentuk etnik karena mencakup pola perilaku, ritual, serta norma sosial yang diwariskan dari generasi ke generasi.
4. Keempat, sejarah kolektif dan mitos asal-usul membangun rasa kesatuan yang mendalam, meskipun terkadang lebih bersifat simbolis daripada faktual. Kelima, ikatan teritorial juga turut membentuk identitas

etnik, karena tempat tinggal atau tanah leluhur sering menjadi simbol keterikatan emosional.

Selain faktor internal tersebut, hubungan sosial dengan kelompok lain juga sangat berpengaruh dalam memperkuat identitas etnik. Identitas etnik sering kali lebih menonjol ketika ada interaksi dengan kelompok yang berbeda, sehingga batas sosial semakin jelas. Faktor politik dan ekonomi juga berkontribusi dalam mengonstruksi identitas etnik, terutama ketika sebuah kelompok memperjuangkan hak atau pengakuan di tengah negara-bangsa modern. Etnik dapat dipahami sebagai hasil dari interaksi kompleks antara faktor budaya, sejarah, sosial, dan politik. Etnik tidak hanya terbentuk secara alamiah melalui kesamaan asal-usul, tetapi juga dikonstruksi melalui simbol, narasi kolektif, serta relasi sosial yang berlangsung terus-menerus.

Etnik di Papua sangat beragam, terbagi menjadi dua kategori besar, yaitu etnik asli Papua dan etnik pendatang. Dalam konteks Papua, etnik asli Papua memiliki ciri khas antropologis Melanesia yang berbeda dengan etnik di wilayah lain di Indonesia, baik dari segi budaya, bahasa, maupun struktur sosial.

Menurut Suharno (2015), masyarakat asli Papua terdiri dari ratusan etnik dengan bahasa lokal yang berbeda-beda, diperkirakan lebih dari 250 bahasa daerah. Hal ini menunjukkan bahwa identitas etnik di Papua sangat majemuk, meskipun mereka tetap dikategorikan sebagai Orang Asli Papua (OAP). Ciri khas utama etnik asli Papua adalah keterikatannya dengan tanah leluhur, adat istiadat, dan nilai kosmologi yang sangat kuat.

Sementara itu, etnik pendatang di Papua terdiri dari berbagai kelompok yang berasal dari luar Papua, seperti Bugis, Makassar, Jawa, Minahasa, Toraja, dan Buton. Menurut Mansoben (1995), arus migrasi ke Papua meningkat terutama sejak program transmigrasi era Orde Baru. Mobilitas ini membawa dinamika baru dalam interaksi sosial, ekonomi, dan politik, yang memengaruhi pola relasi antara etnik asli dan pendatang.

Etnik pendatang umumnya datang dengan tujuan ekonomi, perdagangan, atau karena program pemerintah. Menurut Suryawan (2011), etnik pendatang sering kali memiliki keunggulan dalam bidang pendidikan dan ekonomi dibandingkan masyarakat asli Papua, sehingga memunculkan kesenjangan sosial. Di sisi lain, kehadiran etnik pendatang juga memberi kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama di sektor perdagangan dan jasa.

Sumber pembentukan etnik di Papua dapat ditinjau dari berbagai faktor.

1. Pertama, bahasa menjadi identitas penting etnik asli Papua, dengan ratusan bahasa lokal yang mencerminkan keanekaragaman budaya. Bahasa menjadi penanda keanggotaan kelompok serta alat mempertahankan tradisi lisan.
2. Kedua, adat istiadat dan kosmologi menjadi pembeda utama. Menurut Geertz (1973), simbol dan sistem makna dalam adat menciptakan rasa

identitas yang kuat. Hal ini terlihat dalam ritual masyarakat Dani, Asmat, dan etnik lainnya yang mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan mitos dan alam.

3. Ketiga, sejarah migrasi membentuk etnik pendatang di Papua. Proses transmigrasi, urbanisasi, dan perdagangan menjadikan pendatang sebagai bagian dari keragaman etnik Papua. Faktor ekonomi menjadi dorongan utama, sementara keterlibatan mereka dalam kehidupan politik lokal menunjukkan bahwa identitas etnik juga bersifat dinamis.
4. Keempat, hubungan sosial antar-etnik turut memperkuat batas identitas. Interaksi antara etnik asli dan pendatang sering kali membentuk persepsi “kami” dan “mereka”, sehingga batas etnik semakin jelas. Namun dalam praktik sehari-hari, terjadi pula asimilasi dan perkawinan campuran yang memperlihatkan fleksibilitas identitas etnik di Papua.

1.9 Kerangka Berpikir

Pilkada Jayapura 2024 merupakan salah satu momentum penting dalam dinamika demokrasi lokal di Papua, khususnya di Kota Jayapura, yang masyarakatnya terdiri dari berbagai etnik dan latar belakang budaya, termasuk Etnik Bugis. Keberadaan Etnik Bugis di Jayapura telah menjadi bagian tak terpisahkan dari struktur sosial masyarakat setempat, sehingga partisipasi politik mereka turut memengaruhi hasil pemilihan kepala daerah. Penelitian ini dalam konteks Pilkada 2024, dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang membentuk keputusan politik mereka.

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa preferensi pemilih Etnik Bugis tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu, melainkan juga oleh lingkungan sosial, budaya, dan dinamika politik lokal. Oleh karena itu, kerangka berpikir penelitian ini dibangun dengan mengintegrasikan pendekatan sosiologis, psikologis dan rasional. Pendekatan sosiologis menekankan pada pengaruh lingkungan sosial, seperti keluarga, kelompok komunitas, dan tokoh adat, yang secara langsung atau tidak langsung membentuk persepsi sikap politik pemilih Etnik Bugis. Pendekatan psikologis menyoroti faktor-faktor internal, seperti identifikasi diri, loyalitas, dan keterkaitan emosional terhadap kandidat atau partai tertentu. Sementara itu, pendekatan rasional berfokus pada pertimbangan pragmatis pemilih terhadap program kerja, visi dan misi kandidat yang dianggap paling menguntungkan bagi komunitas Etnik Bugis di Jayapura.

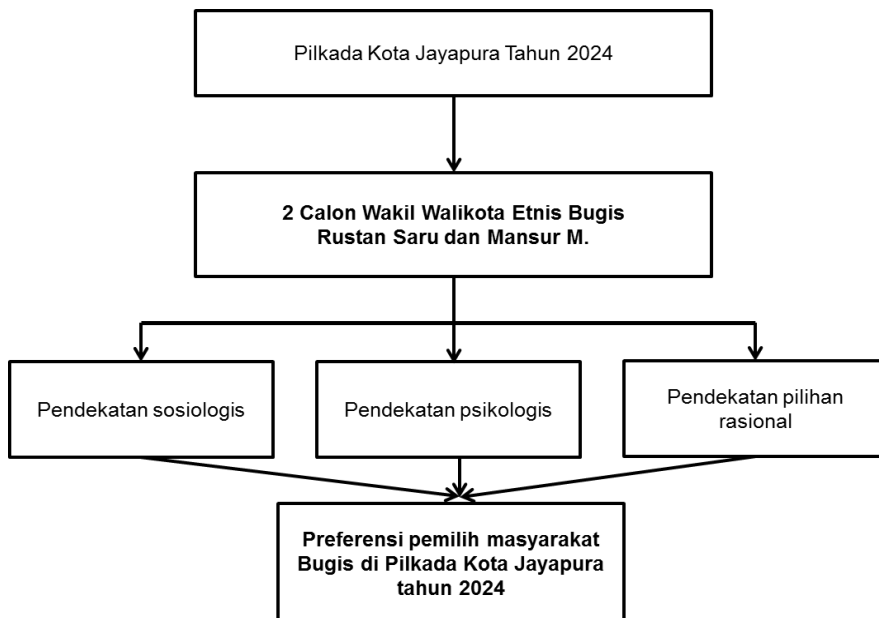
Proses pembentukan preferensi politik Etnik Bugis pada Pilkada Jayapura 2024 merupakan hasil interaksi kompleks antara ketiga pendekatan tersebut. Lingkaran sosial menciptakan tekanan kohesif dan norma kolektif yang membentuk perilaku politik, sedangkan faktor psikologis memperkuat keterkaitan emosional dan loyalitas terhadap kandidat tertentu. Sementara pertimbangan rasional mendorong pemilih untuk memilih kandidat yang dianggap mampu memberikan manfaat konkret bagi kehidupan mereka. Preferensi politik etnik

Bugis tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis secara holistic melalui integrasi ketiga pendekatan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan secara interaktif melalui model Miles dan Huberman, meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian diterapkan dapat memberikan gambaran yang utuh dan mendalam mengenai preferensi politik Etnik Bugis di Jayapura, serta kontribusinya terhadap proses demokrasi lokal. Temuan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kandidat dan pemangku kebijakan dalam merancang strategi kampanye yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan komunitas Etnik Bugis.

Secara keseluruhan, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan di bidang ilmu politik dan komunikasi, khususnya terkait dinamika preferensi pemilih etnik minoritas dalam pemilihan kepala daerah. Selain itu, hasil penelitian juga dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para aktor politik dalam membangun relasi dan komunikasi politik yang efektif dengan komunitas Etnik Bugis di Jayapura.

1.10 Skema Berpikir



Gambar 1.2 Skema Berpikir

BAB II METODE PENELITIAN

Bab ini membahas tentang pendekatan dan tipe penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, informan penelitian dan teknis analisis data.

2.1 Pendekatan dan Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan untuk memahami secara mendalam preferensi politik pemilih dari Etnik Bugis dalam Pilkada Jayapura tahun 2024. Menurut (Leksono, 2013), pendekatan kualitatif lebih menekankan pada pemahaman makna dari pengalaman dan pandangan subjek penelitian, bukan pada angka atau statistik. Dengan tipe deskriptif, penelitian ini berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara rinci dan apa adanya, sesuai dengan realitas di lapangan. Penelitian dilakukan secara induktif, dimana peneliti mengumpulkan data melalui wawancara dan observasi, lalu menyusun pemahaman berdasarkan temuan di lapangan. Teori digunakan hanya sebagai panduan awal dan tidak menentukan arah atau hasil penelitian.

2.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Jayapura, Provinsi Papua, yang merupakan lokasi pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Jayapura Tahun 2024. Kota ini dipilih karena memiliki keberagaman etnik, termasuk komunitas etnik Bugis yang signifikan, sehingga relevan untuk mengkaji preferensi pemilih etnik Bugis dalam konteks Pilkada tersebut.

2.3 Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder (Kusumastuti & Khoiron, 2019):

1. Data primer: data ini berupa teks hasil wawancara dan diperoleh melalui wawancara dengan informan yang sedang dijadikan sampel dalam penelitiannya. Untuk itu, informasi yang diperoleh langsung dari para pemilih etnik Bugis di Kota Jayapura melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif.
2. Data sekunder: berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan membaca, melihat atau mendengarkan. Dalam hal ini berupa dokumen, laporan, berita dan literatur terkait Etnik Bugis dan Pilkada Jayapura 2024 serta teori-teori tentang perilaku dan preferensi pemilih yang relevan untuk mendukung analisis data.

2.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mengeksplorasi suatu fenomena guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap makna dibalik perilaku, pengalaman atau situasi tertentu (Lestari, Aprisa, & Dewi, 2024). Dalam pelaksanaannya dibutuhkan teknik dalam pengumpulan data. Metode yang umum digunakan mencakup pengumpulan informasi melalui sumber bacaan, wawancara mendalam, observasi secara langsung atau partisipatif, serta telaah terhadap dokumen yang relevan. Menurut (Saleh, 2023) teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi:

1. Wawancara (*interview*), adalah percakapan antara peneliti dengan informan dengan maksud untuk memperoleh informasi atau data sesuai dengan tujuan penelitian.
2. Observasi (pengamatan), merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati langsung subjek penelitian serta mencatat kejadian dan perilaku secara alami, tanpa rekayasa, dalam situasi yang berlangsung sponta dan dalam jangka waktu tertentu, sehingga menghasilkan data akurat, mendalam dan terperinci.
3. Dokumentasi, adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi yang relevan dengan objek penelitian, khususnya melalui dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan yang dikaji. Dokumen tersebut dapat berupa catatan penting, peraturan, naskah, foto, manuskrip, maupun jenis dokumen lain yang mendukung kebutuhan data penelitian.

Teknik pengumpulan berupa wawancara, observasi dan dokumentasi diterapkan secara terintegrasi untuk memperoleh data yang komprehensif dan valid. Wawancara digunakan sebagai instrumen utama untuk menggali alasan, motivasi, serta faktor-faktor yang mempengaruhi preferensi politik pemilih Etnik Bugis, sehingga memungkinkan peneliti memahami perspektif subjektif dan latar belakang yang mendasari pilihan mereka. Observasi dilakukan untuk mengamati dinamika sosial-politik lingkungan komunitas Etnik Bugis selama masa kampanye hingga hari pencoblosan, guna mengidentifikasi pola perilaku, tekanan sosial atau pengaruh lingkungan yang berpotensi memengaruhi proses pengambilan keputusan pemilih. Sementara itu, dokumentasi dilaksanakan melalui pengumpulan data resmi seperti hasil Pilkada, data KPU, serta catatan lapangan, yang berfungsi untuk melengkapi dan memvalidasi data primer sekaligus memperkuat analisis mengenai signifikansi preferensi pemilih Etnik Bugis terhadap hasil Pilkada di Jayapura.

2.5 Informan Penelitian

Informan penelitian atau narasumber merupakan individu kunci dalam penelitian lapangan yang berperan sebagai pihak yang dihubungi oleh peneliti

untuk memberikan penjelasan atau informasi terkait situasi, kondisi dan konteks di lapangan yang menjadi objek kajian (Albina, 2023). Pada penelitian ini, informan penelitian adalah yang memiliki pengetahuan mengenai preferensi, motivasi dan faktor-faktor yang memengaruhi pilihan politik mereka dalam konteks Pilkada Jayapura 2024.

Tabel 2.1 Data Informan Penelitian

No.	Nama	Usia	Kecamatan	Lama Tinggal di Kota Jayapura
1.	HL	56 tahun	Jayapura Utara	20 tahun
2.	ABL	73 tahun	Muara Tami	52 tahun
3.	NM	29 tahun	Heram	Sejak lahir
4.	ASB	24 tahun	Abepura	5 tahun
5.	ES	45 tahun	Jayapura Selatan	15 tahun
6.	HE	48 tahun	Jayapura Utara	20 tahun
7.	R	30 tahun	Abepura	Sejak lahir
8.	M	30 tahun	Heram	Sejak lahir
9.	SNAM	19 tahun	Jayapura Selatan	Sejak lahir
10.	T	36 tahun	Jayapura Utara	11 tahun
11.	HR	51 tahun	Muara Tami	35 tahun
12.	NAP	35 tahun	Muara Tami	12 tahun
13.	UL	25 tahun	Jayapura Selatan	3 tahun
14.	SR	24 tahun	Heram	6 tahun
15.	MA	29 tahun	Abepura	7 tahun

Sumber: Hasil Olahan Data

Informan dalam penelitian ini berjumlah 15 orang yang berasal dari masyarakat Bugis di Kota Jayapura. Penentuaninforman dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan variasi latar belakang sosial, profesi, pengalaman politik, serta keterlibatan dalam dinamika Pilkada Kota Jayapura 2024. Informan di klasifikasikan ke dalam beberapa kategori, antara lain tokoh komunitas Bugis di masyarakat bugis dengan pekerjaan formal dan informal, serta pemilih yang menunjukkan kecenderungan orientasi psikologis dan pilihan rasional dalam menentukan preferensi politiknya. Jumlah 15 informan dinilai sudah memadai karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang menekankan kedalaman data, bukan jumlah responden. Informan dibagi merata di 5 dsitrik Kota Jayapura, masing-masing 3 informan, untuk menangkao variasi kondisi sosial dan politik antarwilayah. Penentuan wilayah informan didasarkan pada prinsip kejenuhan data, di mana informasi yang diperoleh sudah berulang dan tidak lagi menghasilkan temuan baru. Oleh karena itu, 15 informan dinilai cukup dan sesuai dengan tujuan penelitian.

2.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat di informasikan kepada orang lain (Sadih, 2015). Pada penelitian kualitatif deskriptif, teknik analisis data yang lebih menekankan pada penjelasan, pemaknaan dan interpretasi terhadap data yang bersifat naratif atau deskriptif, bukan pada angka atau statistik (Aulia, 2023).

Analisis data pada penelitian ini dilakukan menurut analisis model Miles dan Huberman dalam Sugiyono (1984) yang dikutip dari (Utami, 2016), mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan langsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis tersebut meliputi reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

1. Reduksi Data

Tahap ini mencakup proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam. Reduksi data bertujuan untuk mengorganisasi informasi agar lebih terarah pada isu sentral penelitian, yaitu bagaimana preferensi politik pemilih Etnik Bugis di Jayapura.

2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, tahap berikutnya adalah menyusun data dalam membentuk naratif yang sistematis. Penyajian data ini dilakukan melalui deskripsi tematik yang menggambarkan pola-pola pemaknaan, persepsi, serta sikap masyarakat terhadap perpustakaan desa. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi keterkaitan antar data dan menyusun dasar untuk menarik kesimpulan.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Pada tahap akhir, peneliti melakukan interpretasi terhadap data yang telah disajikan untuk menemukan makna-makna substantif yang mencerminkan konstruksi sosial masyarakat. Kesimpulan yang ditarik bersifat sementara dan terus diverifikasi sepanjang proses penelitian berlangsung, melalui pengujian konsistensi temuan, triangulasi sumber data, dan validasi informasi.